

ABSTRAKSI

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi financial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik didalam produk maupun kelembagaan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk sebagai betuk pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan agar dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sehingga tercapai perekonomian yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Otoritas Jasa Keuangan mengubah secara mendasar struktur pengawasan keuangan di Indonesia . Pengawasan bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank yang dilakukan oleh Bapepam akan menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Apa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dibidang Perbankan, Ansuransi, Dana Pensiun, Sekuritas, Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat dan Apakah implikasi yuridis dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan terhadap kewenangan untuk mengajukan pailit yang dimiliki

oleh Bank Indonesia, Bapepam, dan Kementerian Keuangan . Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mencari jawaban dan menganalisis mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dibidang Perbankan, Ansuransi, Dana Pensiun, Sekuritas, Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat serta untuk mencari jawaban dan menganalisa implikasi yuridis terbentuknya Otoritas Jasa keuangan terhadap kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia, Bapepam, dan kementerian Keuangan khususnya dalam mengajukan pailit. Beralihnya kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan yang dimiliki Bank Indonesia, Bapepam dan kementerian keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak secara otomatis merubah kewenangan lembaga tersebut dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 2 ayat 5 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan dan Pengawasan, Kepailitan

ABSTRACT

The process of globalization in the financial system and the rapid advancement of information technology and financial innovation has created a financial system that is very complex, dynamic and interconnected between both sub-sectors within the financial and institutional product.

Financial Services Authority is an independent body and is free from interference by other parties that formed as a form of supervision the activities within the financial services sector to be held on a regular basis, fair, transparent, accountable and capable of protecting the interests of consumers and society in order to reach an economy that is able to grow sustainable and stable.

Financial Services Authority fundamentally change the structure of financial supervision in Indonesia. Supervision of banks that had been conducted by Bank Indonesia and supervision of capital markets and non-bank financial institutions conducted by Bapepam will be the duty of the Financial Services Authority.

The problem in this thesis is what power the Financial Services Authority in the field of Banking, insurance, Pension Funds, Securities, Venture Capital and Corporate Financing and other agencies operating in the management of public funds and its juridical implications of the establishment of the Financial Services Authority of the authority to file bankruptcy owned by Bank Indonesia, Bapepam, and the Ministry of Finance. The purpose of this thesis is to find answers and analyze the authority

of the Financial Services Authority in the field of banking, insurance, Pension Funds, Securities, Venture Capital and Corporate Financing and other agencies operating in the management of public funds and to seek answers and analyze the implications of juridical formation Services Authority against finance authority held by the Bank Indonesia, Bapepam, and in particular the Ministry of Finance in filing bankruptcy. The transfer of authority in the regulation and supervision of the Bank Indonesia, Bapepam and the Finance Ministry to the Financial Services Authority does not automatically change the authority of the agency in filing for bankruptcy as referred to in Article 2, paragraph 3, Article 2, paragraph 4 and paragraph 5 of Article 2 of Law No. 37/2004 on Insolvency. In this thesis, the author uses the statutory approach and the conceptual approach.

KEYWORDS : Financial Services Authority, Regulation and Supervision, Bankruptcy